



# **WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENYELESAIANNYA**

**(Studi Kasus pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG)**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh**

**RERI HERNANINGSIH  
NPM. 5117500203**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2020**

# **PENGESAHAN**

## **JUDUL SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA SERTA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PADA  
PUTUSAN NOMOR 403/PDT/2016/PT.BDG)**

**Oleh :  
RERI HERNANINGSIH  
NIM. 5117500203**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 2 Mei 2020**

**Penguji I**



**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H  
NIDN. 0608087702**

**Penguji II**




**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN. 0619058703**

**Pembimbing I**



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H  
NIDN. 0609086202**

**Pembimbing II**



**H. TONI HARYADI, S.H., M.H  
NIDN. 0020045801**

**Mengetahui  
Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**



**Dr. H. ACHMAD IRWAN HAMZANI, S.H.I., M.Ag.  
NIDN. 0615067604**

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

## **JUDUL SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN  
JASA SERTA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN  
NOMOR 403/PDT/2016/PT.BDG)**

**Disusun Oleh :**

**RERI HERNANINGSIH  
NIM. 5117500203**

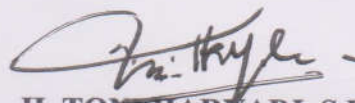
**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Pembimbing I**



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H  
NIDN. 0609086202**

**Pembimbing II**



**H. TONT HARYADI, S.H., M.H  
NIDN. 0020045801**

**PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : RERI HERNANINGSIH  
NPM : 5117500203

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL “WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 403/PDT/2016/PT.BDG)” INI BESERTA SELURUH ISINYA ADALAH BENAR-BENAR KARYA SAYA SENDIRI DAN SAYA TIDAK MELAKUKAN PENJIPLAKAN ATAU PENGUTIPAN DENGAN CARA-CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKA KEILMUAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT KEILMUAN.

SAYA MENYERAHKAN SKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN DIDALAMNYA MENJADI MILIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SERTA MEMBERIKAN IJIN UNTUK MERECOVERY DAN MEMPUBLIKASIKAN DALAM BENTUK JURNAL BAIK ATAS NAMA SAYA ATAUPUN TIDAK MELIBATKAN SAYA.

ATAS PERNYATAAN SAYA INI, SAYA SIAP MENANGGUNG RESIKO/SANKSI YANG DIJATUHKAN KEPADA SAYA APABILA DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN TERHADAP ETIKA KEILMUAN DALAM KARYA SAYA INI ATAU ADA KLAIM DARI PIHAK LAIN TERHADAP KARYA SAYA INI.

TEGAL, 02 Mei 2020

YANG MENYATAKAN



**RERI HERNANINGSIH**

## ABSTRAK

**Reri Hernaningsih**, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penyelesaiannya (Studi Kasus pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG)*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020.

Perjanjian pengadaan memiliki fungsi sangat penting dalam pembangunan perekonomian Negara, jumlah uang negara yang terlibat di dalam perjanjian ini sangat besar. Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Adanya pemutusan perjanjian seringkali timbul sengketa karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG, 2) Mengkaji penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa yaitu Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG adalah penggugat dianggap melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 80 ayat (2) dan (3). Akibat wanprestasi tersebut dikenakan sanksi berupa Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tanggal 27 November 2013, PT. Lewih Mentari menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; 2) Penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG, yaitu Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah didasarkan kontrak Nomor 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013, maka, mengacu pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang ada di huruf R tersebut, telah secara tegas disebutkan bahwa semua Sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyelesaian.

## ABSTRACT

**Reri Hernaningsih**, *Default in the Implementation of Procurement of Goods and Services and Their Settlement (Case Study in Decision No. 403/PDT/2016/PT.BDG)*. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2020.

Procurement agreements have a very important function in developing the country's economy, the amount of state money involved in this agreement is very large. Failure to fulfill this achievement is often the basis for the injured party to break the agreement. Disputes often arise due to disputes because there are parties who feel disadvantaged due to this.

The purpose of this study is to: 1) Describe the form of default in the procurement of goods and services in the decision No. 403/PDT/2016/PT.BDG, 2) Reviewing the legal settlement of goods and services procurement disputes that are not in accordance with the agreement in decision No. 403/PDT/2016/PT.BDG. This type of research is normative legal research. The data source of this research is secondary data, which includes: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method uses literature and document studies. Analysis of research data using qualitative descriptive analysis.

The results of the study obtained a conclusion that: 1) Forms of default in the implementation of procurement of goods and services, namely Exploration Contracts and Clean Water Services through Groundwater Drilling in decision No. 403/PDT/2016/PT.BDG is the plaintiff considered doing what was promised but it was too late. In accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Procurement of Goods and Services, Article 80 paragraphs (2) and (3). As a result of the default is subject to sanctions in the form of termination of the package contract delivered by letter Number: 187/91/BGE.P2K/2013 dated November 27, 2013, PT. Lewih Mentari stopped all work that was not completed and included in the Black List; 2) Settlement of legal disputes over the procurement of goods and services that are not in accordance with the agreement in decision No. 403/PDT/2016/PT.BDG, i.e. Dispute on the Procurement of Goods and Services in Exploration Contracts and Clean Water Services through Groundwater Drilling based on contract Number 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 dated April 9, 2013, then, referring to the Special Conditions of Contract (SSKK) contained in letter R, it has been explicitly stated that all Disputes arising from this Contract, will be resolved and decided by the Indonesian National Arbitration Board (BANI) according to administrative regulations and BANI arbitration procedure rules. Thus the Bandung District Court is not authorized to examine and try the case.

**Keywords:** Default, Procurement of Goods and Services and Completion.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang, yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan-rekan yang mendukungku dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- Almamater UPS Tegal.

## **MOTTO**

Jangan menghukum waktu terbaik dengan keterlambatan. Karena dalam urusan perasaan, tidak ada yang tahu kapan dan di mana tibanya.

**(Tere Liye)**

Berubah sebelum waktunya adalah hal yang beresiko, tetapi berubah pada saat anda harus berubah adalah sebuah keterlambatan.

**(Bong Chandra)**

Orang bijak selalu menepati janji, tapi orang paling bijak adalah yang berhati-hati sebelum berjanji. Sesungguhnya dibalik kata maaf ada janji untuk menjadi lebih baik dan tak akan mengulangi kesalahan yang sama.

**(Reri Hernaningsih)**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Burhan Eko Purwanto, M. Hum, selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dengan sabar kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Toni Haryadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulisan skripsi ini hingga terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan penulis.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, Mei 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 16
A. Tinjauan tentang Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	20
3. Subjek Hukum Perjanjian .....	25
B. Tinjauan tentang Wanprestasi .....	27
1. Pengertian Wanprestasi .....	27
2. Akibat Hukum Wanprestasi .....	32
3. Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi .....	33

C. Tinjauan tentang Pengadaan Barang dan Jasa .....	34
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa .....	34
2. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa .....	36
3. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa .....	38
4. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa .....	39
5. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa .....	40
6. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa .....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG .....	47
B. Penyelesaian Hukum Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG .....	58
BAB IV PENUTUP .....	79
A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan pemerintah sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tujuan pembangunan pada dasarnya untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan baik pembangunan fisik maupun non fisik memegang peranan yang penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peran pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, kewajiban tersebut pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Demi mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa Barang, dan Jasa maupun

---

<sup>1</sup> Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hal. 40.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 157.

pembangunan infrastruktur. Di samping itu, Pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga Barang dan Jasa, untuk itu perlu pengadaan Barang dan Jasa.<sup>3</sup> Sehubungan dengan tujuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu melaksanakan kegiatan yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana diwujudkan dengan adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>4</sup>

Terselenggaranya tugas pembangunan dan tugas pelayanan public sebagai kegiatan pengelolaan negara tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada instansi pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus diatur dalam Peraturan Perundang-undangan setingkat Peraturan Presiden. Pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu perjanjian yang sangat mempengaruhi infrastruktur sebuah negara memiliki aturan main utama terbaru yang ada pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang telah menggantikan posisi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang cukup lama berperan menjadi aturan main perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya, perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam pembuatannya tetap mengikuti apa yang telah ada dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Seperti perjanjian pada umumnya dalam perjanjian pengadaan Barang dan Jasa, keabsahan menjadi hal yang penting dalam pembuatan perjanjian

---

<sup>3</sup> Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal.1.

<sup>4</sup> Sudjatmoko, Emanuel, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal 19 Yuridika, 2004, hal. 286.

tersebut. Keabsahan dalam hal ini tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain: kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan Bertindak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu dalam praktek pada umumnya, pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak *vendor* penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Salah satu sengketa yang kerap terjadi adalah wanprestasi yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>5</sup> Wanprestasi merupakan kelalaian, kealpaan, cidera

---

<sup>5</sup> Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 74.

janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Contoh pada umumnya adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (*deadline*) yang telah ditentukan dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan pihak vendor penyedia barang dan jasa.

Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak dapat disebabkan karena wanprestasi maupun *force majeure*. Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Akibat dari adanya pemutusan perjanjian maka seringkali menimbulkan sengketa, dan berupaya menyelesaikan sengketa dimaksud. Salah satu contoh kasus tersebut adalah Putusan Nomor. 403/PDT/2016/PT.BDG, adanya wanprestasi dari PT. Lewih Mentari sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat pemutusan kontrak sebagaimana Surat No. 187/91/BGE. P2K/2013 tanggal 27 Nopember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket SB.7, dengan ketentuan:

1. PT. Lewih Mentari dinyatakan Wanprestasi karena tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan kontrak;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Surat Perjanjian No. 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013 dinyatakan Putus Kontrak secara sepihak;

3. Sebagai tindak lanjut dari point a dan b, maka:

- a. PT. Lewih Mentari menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan membuat laporan untuk pekerjaan yang sudah selesai dan akan ditagihkan;
- b. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;
- c. Uang muka dilunasi dengan cara dikurangi dari pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dan membayar denda keterlambatannya; dan
- d. PT. Lewih Mentari dimasukan dalam Daftar Hitam.

Perjanjian pengadaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara jumlah uang negara yang terlibat di dalam perjanjian ini sangat besar dan dapat dikatakan efektif sebagai sebuah strategi untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi.<sup>6</sup> Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya merupakan sebuah upaya dari pihak pengguna anggaran untuk mewujudkan barang atau jasa yang dikehendaki dengan menggunakan metode-metode serta proses tertentu yang tidak menyalahi peraturan yang ada.<sup>7</sup>

Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain, dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa suatu prestasi yang terdapat pada isi perjanjian dapat terpenuhi maupun tidak terpenuhi baik sebagian atau seluruhnya. Dengan tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak karena wanprestasi maupun *force majeure*. Kegagalan pemenuhan prestasi ini

---

<sup>6</sup> Simamora, Y. Sogar. *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2009, hal. 5.

<sup>7</sup> Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 3.



seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memutuskan perjanjian. Dengan adanya pemutusan perjanjian maka seringkali timbul sengketa karena ada pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut.

Namun bila dilihat lebih lanjut dalam garis besar proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan pelaporan, terkait dengan proses tersebut, terdapat hal yang dapat melemahkan posisi para pihak. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah (pengguna barang/jasa) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melalui kontrak berupa perjanjian tertulis antara pengguna barang dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Dalam kontrak tersebut, pemerintah tidak mewajibkan untuk dibuat dalam akta otentik. Hal ini berarti para pihak yaitu pengguna barang dan penyedia menggunakan akta di bawah tangan sebagai kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, karenanya bila terhadap kontrak pengadaan barang/jasa tersebut terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal pemenuhan ketentuan dalam perjanjian yang ada dalam kontrak (wanprestasi) maka kontrak tersebut sebagai akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini perlu dilakukan pembuktian di pengadilan,

sehingga kontrak tersebut dapat menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya sengketa wanprestasi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dan penyelesaiannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Penyelesaiannya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG?
2. Bagaimana penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG.
2. Mengkaji penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, dapat menjadi bahan kajian akademis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya.
2. Manfaat praktis, memberikan pemahaman kepada bagi penyedia jasa agar pada saat serah terima pekerjaan dari pengguna jasa ke penyedia jasa memperhatikan keberadaan atau lokasi dan kemampuan, dimana penyedia jasa harus melaksanakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak kerja sesuai dengan waktu yang disepakati.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Musa Darwin Pane (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). *Jurnal Media Hukum: Vol. 24 No. 2, Desember 2017 (147-155)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi

yang kondusif, efisiensi belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Julianda B. Manuhu (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan: Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017 (296-310)*. Kesimpulan dalam kajian ini diantaranya: a) Lemahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan PBJP; b) Penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara PBJP adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan dualisme hukum terkait kewenangan dan proses penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan PBJP; tidak adanya ketentuan jelas dan tegas setingkat undang-undang mengenai penanganan pelanggaran penyelenggaraan PBJP, baik secara perdata, administrasi dan pidana; dan lemahnya *political will stakeholders* terkait perlindungan hukum bagi penyelenggara PBJP.

Krishna Darari Hamonangan Putra (2019). Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 (1303-1318)*. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Macam cara penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui jalur diluar pengadilan atau alternatif sangatlah beragam. Terbitnya aturan terbaru mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksanaannya, ada cara penyelesaian sengketa baru yang dapat digunakan oleh pihak yang bersengketa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak.

Rahmawati Tomalili (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelayanan Publik. *Halu Oleo Legal Research: Vol. 1 No. 1, 2019 (E-ISSN: 2657-0017)*. Dalam penelitian ditemukan beberapa hasil kedudukan hukum pengadaan barang dan jasa dapat menjamin peningkatan pelayanan publik hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan pelaksana pengadaan barang/jasa yang memiliki kriteria keadaan tertentu terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi yang merujuk pada prinsip hukum transparansi dan akuntabilitas sehingga terpenuhi pelayanan publik atas pengelolaan pengadaan barang/jasa. Bahwa pengaturan hukum atas Tanggung Jawab Jabatan Pengguna Anggaran sebagai Organ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki korelasi antara tanggung gugat lembaga peradilan pada jabatan pengguna anggaran atas kesalahan penggunaan metode penunjukan langsung menjadi tanggung jawab institusi, untuk tanggung gugat perdata dan tanggung jawab pidana pada jabatan pengguna anggaran atas kesalahan penggunaan metode penunjukan langsung, menjadi tanggung jawab pribadi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *Case Approach* (pendekatan kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan hukum terkait dengan masalah penelitian.

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.<sup>9</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena permasalahan hukum yang muncul

---

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 52.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 15.

di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum atau semua perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.

Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.<sup>10</sup> Sumber data penelitian ini yaitu Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG.

Jenis data sekunder, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak

---

<sup>10</sup> Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 99.

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hal. 142.

lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku hukum,<sup>12</sup> seperti: dokumen pengadilan, buku tentang hukum dan jurnal.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: kamus, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka dengan cara menelusuri perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, *searching* internet, dan pembelian buku referensi guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen dengan mencari data-data terkait dengan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 36.

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono. *Op Cit.*, hal. 21.



menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Analisis deskriptif analitik ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.<sup>14</sup>

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data terkumpul yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penyelesaiannya pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan-urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hal. 16-19.

- Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan teori-teori terkait permasalahan penelitian yaitu tinjauan tentang perjanjian meliputi pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, subjek hukum perjanjian; tinjauan tentang wanprestasi meliputi pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi; dan tinjauan tentang pengadaan barang dan jasa meliputi pengertian pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, jenis-jenis pengadaan barang dan jasa, tujuan pengadaan barang dan jasa, prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa, pelaku pengadaan barang dan jasa.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG dan penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG.
- Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian dan memaparkan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>15</sup> Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>16</sup>

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*agreement*” dalam bahasa Inggris.<sup>17</sup> Istilah “hukum perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “hukum perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>18</sup>

Pengertian Perjanjian juga diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 458.

<sup>16</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hal. 338.

<sup>17</sup> Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 2.

dari kontrak atau perjanjian mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut, antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata 'mengikatkan' hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>19</sup>

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.

---

<sup>19</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 80-81.

Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu: Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Jadi, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>20</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>21</sup> Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata belum mencerminkan asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan merupakan hal yang

---

<sup>20</sup> Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta, 2008, hal. 14.

<sup>21</sup> Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009, hal. 84.

<sup>22</sup> Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hal. 43.

penting dalam sebuah perjanjian, sebab merupakan syarat pertama sahny suatu perjanjian.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata jika diperhatikan dengan seksama, ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>23</sup> Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>24</sup> Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan.

---

<sup>23</sup> Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 92.

<sup>24</sup> Salim, H.S., *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hal. 27.

<sup>25</sup> Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 91.

## **2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan suatu ketentuan antara mereka untuk melaksanakan prestasi. Kaitannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri.

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, hal tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, c) Suatu hal tertentu, dan d) Sesuatu sebab yang halal.

Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Pernyataan sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.

a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri

Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu secara timbal balik. Adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, jadi tidak boleh hanya karena kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan oleh karena tekanan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah karena: a) Kekhilafan atau kekeliruan (*dwaling*), b) Pemerasan/paksaan (*dwang*), dan c) Penipuan (*bedrog*). Unsur kekhilafan/kekeliruan dibagi dalam dua bagian, yakni kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*. Dan kekhilafan barangnya dinamakan *error in substansia*. Mengenai kekhilafan/kekeliruan yang dapat dibatalkan, harus mengenai intisari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/kekeliruan mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH Perdata).



Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian (Pasal 1324 KUH Perdata). Mengenai pengertian penipuan ini terjadi apabila menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain menimbulkan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. Untuk mengatakan terjadi suatu penipuan, maka harus ada kompleks dari muslihat-muslihat itu. Penipuan terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuik karenanya untuk memberi perizinan.

Suatu penipuan adalah apabila ada keterangan-keterangan yang tidak benar (palsu) disertai dengan kelicikan-kelicikan atau tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya, dalam hal ini pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang. Misalnya, perbuatan memperjualbelikan sebuah rumah yang bukan merupakan hak miliknya dengan memalsukan surat-suratnya.

b. Kecakapan para pihak pembuat perjanjian

Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu

peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. Apabila dilihat dari sudut ketertiban umum, maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang itu sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus

ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan”. Sebelumnya dalam Pasal 1332 KUH Perdata dikatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.

Dengan demikian barang-barang di luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian, misalnya, barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan orang banyak, seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan udara. Perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian sebab pada syarat keempat untuk sahnya perjanjian tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka bahwa maksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh undang-undang dengan sebab yang halal.

Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dihiraukan oleh undang-undang. Undang-undang hanya menghiraukan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi dimaksud dengan sebab atau causa dari sesuatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah persetujuan yang tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian bercausa tidak halal, perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Jadi tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim.

Syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian. Dengan kata lain bahwa tujuan yang mengadakan perikatan semula adalah gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di muka hakim. Syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak meminta perjanjian itu dibatalkan, yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa dirinya tertipu oleh suatu hal.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada diberikan suatu formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-hal pokok perjanjian. Tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-undang yang dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru dapat berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian formal.

### **3. Subjek Hukum Perjanjian**

Setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya dalam mengadakan suatu perjanjian. Jika subjek hukumnya adalah “orang” orang tersebut harus cakap

hukum. Syarat-syarat orang yang cakap hukum oleh Abdulkadir Muhammad dalam hukum perdata Indonesia adalah:

- a. Seseorang yang sudah dewasa, pengetahuan dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam Hukum perdata.
- b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.<sup>26</sup>

Namun, jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.<sup>27</sup> Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Syarat formil yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum, yaitu:

- a. Harus ada akta pendirian dari Notaris.
- b. Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Untuk mendapat status tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua Pengadilan Negeri domisili perusahaan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 27.

<sup>27</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 3.

<sup>28</sup> <http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum>, diakses tanggal 10 Mei 2020.

Menurut Meyers sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa syarat material badan hukum adalah:

- a. Ada harta kekayaan, bukan harta kekayaan pribadi anggota, pendiri atau pengurusnya.
- b. Ada tujuan tertentu,
- c. Ada kepentingan sendiri
- d. Ada organisasi yang teratur

Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.

## **B. Tinjauan tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi berhubungan erat adanya perjanjian antar pihak. Perikatan yang bersifat timbal balik, senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif.<sup>29</sup>

Wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cedera janji berasal dari bahasa Belanda

---

<sup>29</sup> Hernako, Agus Yudha, *Op Cit.*, hal. 260.

yaitu dari kata “wan” yang diartikan tidak ada kata “prestasi” yang diartikan perstasi/kewajiban jadi wanperestasi berarti perstasi yang buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>30</sup>

Wanprestasi merupakan kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*” atau “*breach of contract*”. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama. Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh di lakukan.<sup>32</sup>

Wanprestasi tidak lepas dari masalah pernyataan lalai maupun kelalian. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk

---

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Interamas, 2007 hal. 46.

<sup>31</sup> Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 17

<sup>32</sup> Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Pradamedia Group, 2005, hal. 41.

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>33</sup> Tindakan wanprestasi ini bisa terjadi karena:

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum perjanjian tidak begitu membedakan apakah suatu perjanjian tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat umumnya tetap sama, yaitu pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu, kecuali tidak dilaksanakannya perjanjian karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).<sup>34</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi.<sup>35</sup> Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.<sup>36</sup> Somasi merupakan peringatan kepada pihak yang lalai atau tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu

---

<sup>33</sup> Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 87.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 88

<sup>35</sup> HS., Salim, *Op Cit.*, hal. 98.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 96.



minaml telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita.<sup>37</sup> Pemberian somasi dilakukan dengan harapan agar pihak yang disomasi menyadari kelalaiannya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, bentuk somasi antara lain:

- a. Surat perintah tersebut berasal dari hakim berbentuk penetapan yang akan diberitahukan secara lisan kepada pihak yang lalai melalui juru sita.
- b. Akta sejenis, akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.
- c. Berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri.

Apabila pihak yang wanprestasi tidak mengindahkan somasi sebanyak tiga kali maka pihak yang merasa dirugikan dapat membawa persoalan tersebut ke Pengadilan. Pengadilan lah yang nanti akan memutuskan apakah persoalan tersebut termasuk wanprestasi atau tidak. Dalam mengadili perkara wanprestasi hasil akhir tergantung dari kebijakan hakim dalam mengadili perkara. Terdapat beberapa kritesia dasar pedoman bagi hakim dalam mengeluarkan kebijakannya, antara lain :

- a. Kelayakan kompensasi. Kelayakan kompensasi akan dilihat ketersediaan kompensasi bagi pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Apabila tidak cukup baik tersedia kompensasi atau sulit menghitung ganti rugi, maka pelaksanaan kontrak substansial akan sulit diakui.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>38</sup> Fuady, Munir, *Op Cit.*, hal. 92.

- b. Hilangnya keuntungan yang diharapkan. Semakin besar keuntungan yang hilang atas ketidaksempurnaan pelaksanaan perjanjian maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya wanprestasi.
- c. Bagian kontrak yang dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi dapat menjadi tolak ukur kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak dalam perjanjian.
- d. Kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak. Apabila ada bagian kontrak yang tidak dilaksanakan dengan unsur kesengajaan (bukan karena kelalaian atau sebab-sebab lain yang mengandung unsur itikad baik), unsur kesengajaan mana biasanya terlihat dari dengan sengaja mengabaikan kotraknya, atau dengan sengaja memasang material yang tidak memenuhi standar, dapat dikatakan bahwa dia belum melaksanakan kontrak secara substansial.<sup>39</sup>
- e. Kesiediaan untuk memperbaiki prestasi. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi mempunyai niat dan dapat memperbaiki prestasinya, maka dianggap tidak terjadi wanprestasi yang bersifat material.
- f. Keterlambatan melaksanakan prestasi. Apabila keterlambatan melaksanakan prestasi sangat merugikan pihak lain dalam perjanjian maka wanprestasi bersifat material. Akan tetapi secara umum keterlambatan pelaksanaan prestasi tidak dianggap sebagai wanprestasi yang bersifat material.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 92-93.

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila seseorang atau badan hukum telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasinya debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur (lihat Pasal 1238 KUH Perdata). Ada empat akibat dari wanprestasi, antara lain:

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila debitur terlambat atau tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan semula. Kreditur berhak pula untuk menuntut ganti rugi kepada debitur akibat ketertambatan maupun tidak terselesainya prestasi.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur seperti yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan ini timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak diperkenankan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

### 3. Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi

Tuntutan ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian harus ada ikatan perjanjian antara penggugat dan tergugat, pihak ketiga yang tidak ada dalam perjanjian tidak dapat menuntut adanya ganti rugi dengan alasan wanprestasi. Ganti rugi yang diperoleh dari wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan atau garansi) dalam perjanjian.<sup>40</sup> Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>41</sup>

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1246 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya.<sup>42</sup>

Ganti rugi wanprestasi tidak bisa terlepas dari istilah somasi yaitu peringatan untuk melakukan ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun dalam perkembangannya menurut para

---

<sup>40</sup> Miru, Ahmadi, *Op Cit.*, hal. 79.

<sup>41</sup> Salim, H.S., *Op Cit.*, hal. 100.

<sup>42</sup> Miru. Ahmadi, *Loc Cit.*

ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda, sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit. Hal-hal yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- c. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.<sup>43</sup>

### **C. Tinjauan tentang Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa dapat diartikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya.<sup>44</sup> Pengadaan merupakan segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan

---

<sup>43</sup> Salim, H.S., *Op Cit.*, hal. 99.

<sup>44</sup> Christopher & Schooner, *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market*, Journal of International Law, 2007, hlm. 82.

peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

Menurut Suherman, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.<sup>45</sup>

Pengertian di atas dipahami bahwa terdapat dua pihak berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN/swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang/jasa tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/

---

<sup>45</sup> Suherman, A.M., *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 2.

perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.<sup>46</sup> Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu instansi secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

---

<sup>46</sup> LKPP, *Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah” dalam Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah, 2010, hal. 8-10.

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan. Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tersebut meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia (pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak).

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, kementerian/ lembaga/ perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam



pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### **3. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa**

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 3 ayat (1), menjelaskan jenis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Penjelasan tentang jenis pengadaan barang dan jasa tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (29) - (32). Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna

Barang. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

#### **4. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa**

Tujuan pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- g. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Agar tujuan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dengan baik, maka peraturan presiden ini menerapkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Pasal 5 peraturan tersebut, antara lain, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

## **5. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip pada Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Efisien, yang dimaksud dengan prinsip efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan biaya dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, yang dimaksud dengan prinsip efektif bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran dimaksud.
- c. Persaingan sehat, yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah diberinya kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk menawarkan barang dan jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, dan tidak terjadi kecurangan dan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- d. Terbuka (Transparansi), yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, metode evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang dan jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- e. Adil/tidak diskriminatif, yang dimaksud dengan adil/tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
- f. Akuntabilitas, yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (laporan) kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran, baik fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku.<sup>47</sup>

Selain menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

---

<sup>47</sup> LKPP, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Modul 1, 2010, hal. 11-12.

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam hal:

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

## **6. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa**

Pelaku pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

- a. PA. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.
- b. KPA. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. KPA juga merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengurusan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. PPK. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

- d. Pejabat Pengadaan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- e. Pokja Pemilihan. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- f. Agen Pengadaan. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- g. PjPHP/PPHP. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- h. Penyelenggara Swakelola. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Pengadaan Barang/Jasa



melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

- i. Penyedia. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG**

Salah satu aktivitas sebelum dilakukan pembangunan adalah adanya proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu hal umum untuk dapat menunjang kinerja. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru seperti bangunan, peralatan dan sebagainya. Dua pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah *petama*, pihak dari instansi yang membutuhkan seperti Pemerintah, BUMN dan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan, *kedua* adalah pihak yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan barang dan jasa tersebut.

Seiring banyaknya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, menjadi titik rawan adanya sengketa dalam pengadaan barang dan jasa karena wanprestasi. Dua kasus wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi adalah wanprestasi dalam pengadaan barang jasa berupa pelanggaran perjanjian tenggat waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dan wanprestasi tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi. Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya, yang disebabkan karena debitor tidak mau

berprestasi atau kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2. Debitur keliru berprestasi. Debitur merasa dalam pemikirannya telah memberikan prestasi, namun dalam kenyataannya, yang diterima oleh kreditor tidak seperti yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat berprestasi. Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, namun tidak sebagaimana diperjanjikan. Debitur digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditor.<sup>48</sup>

Kasus perkara sengketa pengadaan barang dan jasa pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG yaitu yang berhubungan dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Maret 2016, Nomor. 433/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yaitu dengan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu: PT. Lewih Mentari, beralamat kantor di Jalan Braga No. 96 Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat dengan Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah Dan Geologi Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, 40122, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan Kepala Badan Geologi Pusat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 57 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

---

<sup>48</sup> Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2013, hal. 280.

Berdasarkan hasil tender Penggugat mendapatkan pekerjaan proyek pekerjaan Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah Dalam (Paket SB7) di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pemenang tender maka pada tanggal 09 April 2013, Penggugat telah mendapatkan Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah sebanyak 11 (sebelas) titik di daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 79/91/BGE/pP2K/SPK/SB.7/2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan TERGUGAT I (diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah tersebut adalah 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender berlaku sejak 9 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013. Dikarenakan masalah non teknis diantaranya faktor alam, keamanan mengakibatkan kuantitas hasil pekerjaan Penggugat tidak dapat maksimal hingga menjelang berakhirnya jangka waktu pekerjaan yaitu 5 Oktober 2013, yang mana dengan adanya hal tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian pekerjaan hingga 50 (*lima puluh*) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir 38.4 huruf c, dan atas permohonan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan persetujuan.

Penggugat berusaha untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya atas jangka waktu perpanjangan yang diberikan tersebut yaitu 24 Nopember 2013,

namun dengan kondisi alam yang memang tandus dan gersang Penggugat hanya dapat menyelesaikan 5 (*lima*) lokasi sumur bor secara keseluruhan. Atas pekerjaan di 5 (*lima*) titik pekerjaan Penggugat telah dibayarkan 100% (seratus persen).

Sisanya yang 6 (*enam*) lokasi sumur bor saat itu dalam pengerjaan berjalan dimana prestasi pekerjaan mencapai  $\pm 80$  % (*delapan puluh prosen*). Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan oleh:

1. masalah non tekhnis;
2. masalah faktor alam diantaranya daerah tersebut dengan kondisi formasi batuan yang sangat keras, sehingga untuk keperluan air dalam mendukung pengerjaan spool bak dan keperluan lain harus mengambil berpuluh-puluh kilometer dari tempat lokasi proyek dikarenakan sering terjadinya *waterlost* yang mana dalam mengatasinya memerlukan banyak air; dan
3. atas permintaan masyarakat setempat yang meminta penundaan pekerjaan mengingat ada kegiatan pemilihan kepala desa yang dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif.

Namun demikian, setelah pemberian perpanjangan masa kontrak 50 (lima puluh) hari kerja, pihak Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tergugat II telah menerbitkan surat pemutusan kontrak sebagaimana Surat No. 187/91/BGE.P2K/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket SB.7 termaksud. Pemutusan kontrak tersebut sesuai dengan apa

yang telah ditentukan dalam perjanjian, saat pemutusan kontrak tanggal 27 November 2013 kondisi di 6 (*enam*) lokasi sumur bor yang belum mencapai 100% (*seratus prosen*) telah dikerjakan sampai dengan mencapai 70% - 80% (*delapan puluh persen*).

Pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu perjanjian yang sangat mempengaruhi infrastruktur sebuah negara memiliki aturan main utama terbaru yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah menggantikan posisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang cukup lama berperan menjadi aturan main perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya, perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam pembuatannya tetap mengikuti apa yang telah ada dalam *Burgerlijk Wetboek*. Perjanjian pengadaan barang dan jasa, keabsahan menjadi hal yang penting dalam pembuatan perjanjian tersebut. Keabsahan dalam hal ini tetap mengikuti apa yang ada pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*.

Pasal 1238 menegaskan bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara untuk memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasinya yaitu, debitur perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi.

Perjanjian Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah sebanyak 11 (sebelas) titik di daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 79/91/BGE/pP2K/SPK/SB.7/2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Dalam perjanjian tersebut tersebut, disepakati dilakukannya pekerjaan di 11 (sebelas) lokasi pengerjaan dengan jangka waktu penyelesaian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berlaku sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan 5 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.487.995.270,- (*empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*);

Tindak lanjut dari perjanjian tersebut, di tanggal 9 April 2013 dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang intinya terhadap Penggugat agar segera melakukan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pada pelaksanaan pekerjaannya, ternyata Penggugat selaku Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I, hasil penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui pemboran air tanah dalam (Paket S.B. 7), dinyatakan tidak mencapai target. Selanjutnya Tergugat I memberikan peringatan kepada Penggugat untuk segera menindaklanjuti dan/atau memperbaiki kinerja terkait dengan keterlambatan

pekerjaan yang terjadi melalui surat Nomor: 90/85/BGE.P2K/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 56 ayat (1) bahwa dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah diperingatkan, ternyata Penggugat tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Oleh karenanya, Tergugat I kembali mengirimkan surat No. 138/85/BGE.P2K/2013 hal Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 24 September 2013 yang intinya sebagaimana pokok surat, mengingatkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, lagi-lagi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;



- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat, setelah melampaui jangka waktu perpanjangan yang telah diberikan pun, ternyata Penggugat masih tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi terhadap kondisi-kondisi tersebut kemudian dilakukan pemutusan kontrak paket SB-7. Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tanggal 27 November 2013, dengan ketentuan:

- 1. PT. Lewih Mentari dinyatakan Wanprestasi karena tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dalam kontrak;
- 2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Surat Perjanjian No. 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013 dinyatakan Putus Kontrak secara sepihak;
- 3. Sebagai tindak lanjut dari point a dan b, maka:
  - a. PT. Lewih Mentari menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan membuat laporan untuk pekerjaan yang sudah selesai dan akan ditagihkan;
  - b. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;

- c. Uang muka dilunasi dengan cara dikurangi dari pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dan membayar denda keterlambatannya; dan
- d. PT. Lewih Mentari dimasukan dalam Daftar Hitam.

Terhadap pemutusan kontrak tersebut, Tergugat I telah melakukan pembayaran yang mana pembayaran tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab Tergugat I atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat; Pemutusan kontrak merupakan sebuah konsekuensi logis atas ketidakmampuan melakukan pekerjaan dengan baik dan benar seperti apa yang telah diperjanjikan. Hal itu pun diterima dan diakui oleh PT. Lewih Mentari.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa PT. Lewih Mentari sebagai penyedia atau pelaku usaha (Penggugat) yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak telah melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dibuktikan dari Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah sebanyak 11 (sebelas) titik di daerah Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 79/91/BGE/pP2K/SPK/SB.7/2013 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak adalah 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender berlaku sejak 9 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013, namun Penggugat tidak dapat maksimal hingga menjelang berakhirnya jangka waktu pekerjaan yaitu 5 Oktober 2013. Atas permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan hingga 50 (*lima puluh*) hari kerja sebagaimana

ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir 38.4 huruf c, dan atas permohonan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan persetujuan. Tergugat I memberikan peringatan kepada Penggugat untuk segera menindaklanjuti dan/atau memperbaiki kinerja terkait dengan keterlambatan pekerjaan yang terjadi melalui surat Nomor: 90/85/BGE.P2K/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan. Tergugat I kembali mengirimkan surat Nomor 138/85/BGE.P2K/ 2013 hal Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 24 September 2013 yang intinya sebagaimana pokok surat, mengingatkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat

Ternyata Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tergugat II telah menerbitkan surat pemutusan kontrak sebagaimana Surat No. 187/91/BGE.P2K/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket SB.7 termaksud. Pemutusan kontrak tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, saat pemutusan kontrak tanggal 27 November 2013 kondisi di 6 (*enam*) lokasi sumur bor yang belum mencapai 100% (*seratus prosen*) telah dikerjakan sampai dengan mencapai 70% - 80% (*delapan puluh persen*).

Prestasi adalah seseorang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.<sup>49</sup>

Analisis penulis berdasarkan permasalahan yang terjadi dan juga didasarkan teori yang ada, maka bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa yaitu Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG adalah penggugat dianggap melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 80 ayat (2) dan (3), perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan. Akibat perbuatan atau tindakan PT. Lewih Mentari sebagai penyedia atau pelaku usaha melakukan wanprestasi dikenakan sanksi:

1. Digugurkan dalam pemilihan. Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tanggal 27 November 2013, maka Surat Perjanjian No. 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013 dinyatakan Putus Kontrak secara sepihak.
2. PT. Lewih Mentari menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan membuat laporan untuk pekerjaan yang sudah selesai dan akan ditagihkan
3. PT. Lewih Mentari dimasukan dalam Daftar Hitam.

---

<sup>49</sup> Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Pradamedia Group, 2005, hal. 41.

**B. Penyelesaian Hukum Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG**

Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG muncul ketika Penggugat dalam hal ini PT. Lewih Mentari merasa ada kontrak kembali *pasca* pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I melalui surat Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tertanggal 27 November 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih Melalui Pemboran Air Tanah tersebut adalah 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender berlaku sejak 9 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013.

Pada kasus ini PT. Lewih Mentari selaku Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan. Alasan Penggugat adalah dikarenakan masalah non teknis diantaranya faktor alam, keamanan mengakibatkan kuantitas hasil pekerjaan Penggugat tidak dapat maksimal hingga menjelang berakhirnya jangka waktu pekerjaan yaitu 5 Oktober 2013, yang mana dengan adanya hal tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian pekerjaan hingga 50 (*lima puluh*) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Butir 38.4 huruf c, dan atas permohonan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan persetujuan. Penggugat berusaha untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya atas jangka waktu perpanjangan yang diberikan tersebut yaitu 24 Nopember 2013, namun dengan kondisi alam yang

memang tandus dan gersang Penggugat hanya dapat menyelesaikan 5 (*lima*) lokasi sumur bor secara keseluruhan. Dan atas pekerjaan di 5 (*lima*) titik pekerjaan Penggugat telah dibayarkan 100% (seratus persen).

Menurut Penggugat sisanya yang 6 (*enam*) lokasi sumur bor saat itu dalam pengerjaan berjalan dimana prestasi pekerjaan mencapai  $\pm 80\%$  (*delapan puluh prosen*). Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut menurut Penggugat disebabkan oleh:

1. masalah non tekhnis
2. masalah faktor alam diantaranya daerah tersebut dengan kondisi formasi batuan yang sangat keras, sehingga untuk keperluan air dalam mendukung pengerjaan spool bak dan keperluan lain harus mengambil berpuluh-puluh kilometer dari tempat lokasi proyek dikarenakan sering terjadinya *waterlost* yang mana dalam mengatasinya memerlukan banyak air;
3. atas permintaan masyarakat setempat yang meminta penundaan pekerjaan mengingat ada kegiatan pemilihan kepala desa yang dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif.

Namun demikian, setelah pemberian perpanjangan masa kontrak 50 (lima puluh) hari kerja, pihak Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tergugat II telah menerbitkan surat pemutusan kontrak sebagaimana Surat No. 187/91/BGE.P2K/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket SB.7. Pemutusan kontrak tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, namun demikian pada saat pemutusan

kontrak tanggal 27 November 2013 kondisi di 6 (*enam*) lokasi sumur bor yang belum mencapai 100% (*seratus prosen*) telah dikerjakan sampai dengan mencapai 70% - 80% (*delapan puluh persen*).

Mengingat jangka waktu masa berlaku pekerjaan pihak Tergugat I disamakan dengan pekerjaan di daerah lokasi lain seperti di pulau Jawa atau Kalimantan dan lainnya yang kondisi lapangan dan tingkat kesulitannya relatif kecil dibanding dengan daerah yang di kerjakan oleh Penggugat yang benar-benar tandus dan kering sehingga memang sangat memerlukan pelayanan air bersih. Mengingat dasar dari pekerjaan tersebut adalah Eksploitasi dan Pelayanan Air Bersih melalui pengeboran air tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah yang memang secara geografis kesulitan dalam hal pengadaan air, sehingga terhadap program ini masyarakat setempat lokasi pekerjaan Penggugat memberikan apresiasi yang tinggi untuk penyelesaian pelaksanaan pengeboran air dimaksud mengingat air dari hasil pengeboran sudah dapat keluar sehingga masyarakat setempat dalam hal ini diwakili oleh tokoh masyarakat meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat selaku pelaksana dari pekerjaan Eksploitasi dan Pelayanan Air Bersih tersebut untuk dapat meneruskan pekerjaan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat setempat yang memang sangat membutuhkan air.

Penggugat dalam gugatannya mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Tergugat II yakni Badan Geologi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait adanya permintaan dari masyarakat setempat tersebut, dan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II itu secara lisan

memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk melanjutkan penyelesaian sisa 6 (*enam*) lokasi sumur bor sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak antara Penggugat dan Tergugat I.

Atas dasar adanya persetujuan lisan dari Tergugat II dan juga adanya permintaan dari masyarakat setempat, selanjutnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan itikad baik Penggugat menyelesaikan pekerjaan sisa 6 (*enam*) lokasi sumur bor tersebut, dan terhadap hasil pekerjaan tersebut saat ini masyarakat setempat telah dapat memanfaatkan sebagaimana mestinya,

Penggugat menyadari penyelesaian pekerjaan sisa 6 (*enam*) lokasi sumur bor tersebut dilakukan di luar waktu kontrak yang disepakati. Akan tetapi hakikat dari pekerjaan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat setempat dan fakta membuktikan setelah terjadinya pemutusan kontrak tanggal 27 Nopember 2013 oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tergugat I, ternyata masyarakat setempat sangat menghendaki PENGGUGAT dapat meneruskan penyelesaian sisa pekerjaan di 6 (*enam*) lokasi sumur bor sebagaimana uraian Posita Gugatan Penggugat butir 14. 18. Selain itu yang terpenting rencana penyelesaian sisa pekerjaan di 6 (*enam*) lokasi sumur bor telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Tergugat II dan untuk hal tersebut pihak Tergugat II telah memberikan persetujuan lisan kepada Penggugat. Sehingga secara hukum telah terjadi suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata: *“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.



Asas kebebasan berkontrak menjelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya* dan didalam ayat (3) disebutkan persertujuan-persetujuan harus dilaksanakan dngan itikad baik (*asas pacta sunt servanda*). Di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdota dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: *Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal*. Pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdota adalah syarat penting sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara a) tertulis; b) lisan; c) diam-diam; d) simbol-simbol tertentu.

Menurut Penggugat bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdota. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdota yang menyebutkan *“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”*. Apabila ada satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi.

Tindakan Penggugat mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah Dalam di 6 (enam) titik lokasi tersebut di atas, ternyata secara diam diam Tergugat 1 mengetahui terbukti dengan para Tergugat tidak melarang. Selain dari pada itu

tindakan para Tergugat yang mengetahui dan membiarkannya, sebagai tindak lanjut sebagaimana dalam surat nomor: 187/91/BGE.P2K/2013, tertanggal 27 November 2013 Perihal Pemutusan kontrak Paket SB.7 tersebut hanya *meminta Penggugat untuk membuat laporan pekerjaan yang sudah selesai untuk dibuatkan tagihan, dan terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan dan tidak selesai hanya untuk di hentikan saja* tidak ada perintah untuk menyerahkan kepada para Tergugat;

Tindakan para Tergugat yang membiarkan pengerjaan hingga selesai, Penggugat memaklumi mengingat maksud dari tujuan pekerjaan Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah Dalam adalah pengadaan air bersih untuk masyarakat, selain itu apabila ditelantarkan dapat mencederai hati masyarakat yang sangat berharap karena sudah diberikan penyuluhan dan sosialisasi oleh Penggugat. Oleh karenanya mengingat maksud dari pekerjaan dalam pengadaan air kepada masyarakat setempat sudah tercapai, maka prestasi Penggugat telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana sepatutnyalah Penggugat mendapatkan pembayaran dari para Tergugat. Pihak Penggugat telah beberapa kali meminta para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, untuk dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.437.524.045,- (*dua miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu empat puluh lima rupiah*) sebagaimana nilai dalam kontrak atas pekerjaan. Akan tetapi upaya Penggugat tersebut belum mendapatkan suatu kepastian yang jelas. Atas penyelesaian pelaksanaan pengeboran air hasil pekerjaan Penggugat dibuktikan dengan masyarakat

setempat telah dapat memanfaatkannya sebagaimana mestinya, bahkan Pemerintah Daerah setempat telah menerima dengan baik, artinya hak orang lain dalam hal ini masyarakat setempat sudah dapat memanfaatkan air hasil dari pelaksanaan pengeboran Penggugat tersebut, akan tetapi hak Penggugat untuk mendapatkan pembayaran dari Para Tergugat sampai saat ini belum terealisasi.

Sesuai kontrak yang disepakati dilakukannya pekerjaan di 11 (sebelas) lokasi pengerjaan dengan jangka waktu penyelesaian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berlaku sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan 5 Oktober 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.487.995.270,- (*empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*). Tindak lanjut dari perjanjian tersebut, di tanggal 9 April 2013 dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang intinya terhadap Penggugat agar segera melakukan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

Pelaksanaan pekerjaannya, ternyata Penggugat selaku Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I, hasil penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan eksplorasi dan pelayanan air bersih melalui pemboran air tanah dalam (Paket S.B. 7), dinyatakan tidak mencapai target. Tergugat I memberikan peringatan kepada Penggugat untuk segera menindaklanjuti dan/atau memperbaiki kinerja terkait dengan keterlambatan pekerjaan yang terjadi melalui surat Nomor:

90/85/BGE.P2K/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan.

Setelah diperingatkan, ternyata Penggugat tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Oleh karenanya, Tergugat I kembali mengirimkan surat Nomor 138/85/BGE.P2K/2013 hal Penyelesaian Pekerjaan tertanggal 24 September 2013 yang intinya sebagaimana pokok surat, mengingatkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, lagi-lagi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Bahkan, setelah melampaui jangka waktu perpanjangan yang telah diberikan pun, ternyata Penggugat masih tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan, oleh karenanya sebagai konsekuensi terhadap kondisi-kondisi tersebut kemudian dilakukan pemutusan kontrak paket SB-7.

Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tanggal 27 November 2013, maka PT. Lewih Mentari dinyatakan wanprestasi karena tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dalam kontrak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Surat Perjanjian No. 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013 dinyatakan Putus Kontrak secara sepihak. Sebagai tindak lanjut adanya wanprestasi dan pemutusan kontrak, maka: a) PT. Lewih Mentari menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan membuat laporan untuk pekerjaan yang sudah selesai dan akan ditagihkan, b) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara, c) Uang muka dilunasi dengan cara dikurangi dari pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dan

membayar denda keterlambatannya, dan d) PT. Lewih Mentari dimasukan dalam Daftar Hitam.

Terhadap pemutusan kontrak tersebut, Tergugat I telah melakukan pembayaran yang mana pembayaran tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab Tergugat I atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Pemutusan kontrak jelas amat sangat dipahami oleh Penggugat mengingat hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis atas ketidakmampuannya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar sepertiapa yang telah diperjanjikan. Hal itu pun diterima dan diakui oleh Penggugat. Dengan demikian menjadi Tidak Berdasar ketika Penggugat dalam surat gugatannya menyampaikan kembali alasan-alasan permisifnya terkait dengan keterlambatan/ketidaksempurnaan pekerjaan yang dilakukan. Hal itu dikarenakan sebelum melakukan pekerjaannya, Penggugat telah diberi penjelasan teknis dan/ataupenjelasan kondisi/lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Penggugat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang menjadi acuan adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah pertama dengan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, diubah kedua dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, diubah ketiga dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014, diubah keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 3 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang termasuk ke dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa Lainnya. Bidang jasa konstruksi pekerjaan konstruksi menjadi suatu hal yang utama secara keseluruhan dalam kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana dan pra sarana atau satuan infrastruktur pada sebuah daerah sebagai objek keseluruhan bangunan. Pekerjaan Konstruksi dapat dikatakan sebagai jasa pemborongan, karena kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan kuasa pengguna anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Jasa pemborongan dapat dilakukan setelah lahirnya suatu perjanjian pemborongan. Berdasarkan Pasal 1601b KUH Perdata Perjanjian dilakukan dengan pihak satu yang mengikatkan diri untuk mengadakan atau menyelenggarakan serta menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.<sup>50</sup> Selain itu dari lahirnya perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum dari para pihak yang mengadakan suatu pekerjaan konstruksi, dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (6) mengenai pengertian kontrak konstruksi atau kontrak kerja konstruksi

---

<sup>50</sup> Salim. H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Krafika, 2013, hal. 26.

yang merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi para pihak yang ikut serta dalam perjanjian konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Bahwa dalam perkara ini, klasifikasi kontrak terhadap pekerjaan yang (katanya) ada tersebut, masuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Maka secara otomatis, segala hal ikhwal terkait dengan kegiatan tersebut tunduk dan/atau mengikuti Perpres Pengadaan Barang/Jasa.

Perpres Pengadaan Barang/Jasa, telah secara tegas disebutkan: “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian Tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola”. Berdasarkan pada definisi kontrak tersebut, terdapat 2 (dua) hal penting, yaitu, kontrak merupakan perjanjian tertulis dan dibuat oleh PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. Sehingga dengan demikian, dikategorikan sebagai kontrak apabila telah memenuhi 2 (dua) ketentuan tersebut.

Menurut Penggugat, hubungan hukum yang terjadi *pasca* pemutusan kontrak paket SB-7, terjadi lagi melalui adanya kesepakatan lisan. Dan muncul setelah Penggugat berkoordinasi dengan Badan Geologi (*vide: posita 15 Gugatan Penggugat*). Hal tersebut di atas, tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat, kontrak yang (katanya) ada itu tidak terjadi dalam format yang sesuai dan juga tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya. Pasal 55 tentang tanda bukti perjanjian dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa, Bukti adanya sebuah perjanjian dan/atau perikatan dibuktikan salah satunya dengan Surat Perintah Kerja (SPK) sehubungan dengan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

*In casu*, jumlah nominal uang atas pekerjaan yang (katanya) selesai dikerjakan berdasarkan kontrak berjumlah Rp. 2.437.524.045,- (*dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu empat puluh lima rupiah*), sangat jauh di atas jumlah minimal nilai yang ditentukan dalam peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya, baru layak disebut terdapat kontrak untuk melakukan pekerjaan ketika dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari persyaratan tentang pihak Penyedia Barang/Jasa, Penggugat juga sudah tidak semestinya mengaku sebagai pihak yang layak menjadi Penyedia Barang/Jasa. Sebab mengacu pada Pasal 19 Perpres, di



huruf (n) Perpres Pengadaan Barang/Jasa, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penyedia Barang/Jasa adalah “Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam. Berdasarkan surat keputusan kontrak Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tanggal 27 November 2013, salah satu ketentuannya adalah PT. Lewih Mentari dimasukan dalam Daftar Hitam. Hal itu pun dipertegas melalui surat Tergugat I Nomor 188/91/BGE.P2K/2013 tertanggal 28 November 2013, dimana PT. Lewih Mentari (Penggugat) telah dijatuhi sanksi berupa penetapan dalam daftar hitam dengan jangka waktu berlakunya sanksi sejak November 2013 sampai dengan November 2015.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis wanprestasi itu sendiri timbul karena adanya dugaan terhadap salah satu pihak yang melakukan prestasi buruk dalam kontrak yang ada. Dalam konteks ini, hal penting yang ada di dalam kontrak tersebut adalah, adanya hak dan kewajiban yang didalamnya berisi perbuatan, tindakan, kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan/tidak boleh dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat. Fungsi adanya kejelasan hak dan kewajiban yang didalamnya berisi perbuatan, tindakan, kewajiban atau prestasi dari masing-masing pihak adalah untuk mengetahui dan sekaligus melakukan penilaian terhadap kewajiban, perbuatan, tindakan atau prestasi yang harus dilakukan/tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Terkait dengan hal di atas, cara yang digunakan untuk melakukan penilaian tersebut, jelas mengacu pada Kontrak yang dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa telah tegas disebutkan bahwasanya Kontrak merupakan perjanjian tertulis.

Setelah penulis mencermati Surat Gugatan Penggugat, terlihat ketidakmampuan Penggugat untuk menjelaskan dan sekaligus membuktikan kewajiban, perbuatan, tindakan atau prestasi yang harus dilakukan oleh Para Tergugat sebagai dasar untuk menilai prestasi masing-masing pihak, ditambah lagi dengan tidak terpenuhinya prasyarat kontrak sebagaimana ditentukan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa, nyata-nyata semakin menegaskan bahwasanya memang tidak pernah ada hubungan hukum sebagai dasar untuk melanjutkan pekerjaan sebagaimana yang Penggugat sebutkan. Tidak dapat dibuktikannya adanya hak dan kewajiban Para Tergugat, karenanya tidak dapat diketahui kewajiban, perbuatan atau prestasi apa dan kapan harus dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga dengan demikian, menjadi Tidak Berdasar ketika Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi seperti yang Penggugat tuduhkan.

Terkait penyelesaian sengketa kontrak dengan perubahan-perubahan yang kerap kali terjadi terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebabkan cara penyelesaian sengketa berubah mengikuti aturan yang terbaru, maka lembaga penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah pun ikut berubah setiap ada peraturan baru terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan. Berdasarkan cara-cara penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang dalam turut menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Lembaga arbitrase, Lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan Lembaga

Penyelesaian Sengketa Kontrak pengadilan. Lalu selang beberapa tahun, terbitlah peraturan presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang menjadi aturan main dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai sekarang.

Di dalam peraturan Presiden tersebut, terkait dengan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara-cara seperti: a) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak, b) Arbitrase, dan c) Pengadilan. Berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh peraturan presiden terbaru tersebut, Lembaga yang hingga saat ini berwenang untuk turut menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai penyedia Layanan penyelesaian sengketa kontrak Lembaga arbitrase, dan lembaga pengadilan.

Pengertian Arbitrase pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak terdapat pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter. Penunjukan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak berbeda dengan penunjukan arbiter yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbiter pada layanan penyelesaian sengketa yang disediakan oleh LKPP ini ditunjuk oleh Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Pengaturan terkait hal-hal yang berhubungan dengan jalannya proses Arbitrase pada Peraturan Lembaga ini diatur mulai dari Pasal

14 sampai dengan Pasal 42. Prosedur Pelaksanaan Arbitrase memiliki aturan main yang terdapat mulai dari Pasal 33 hingga Pasal 42 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, Arbitrase berlangsung paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima. Tetapi apabila permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa tersebut tidak diputus selama 90 (Sembilan puluh) hari tersebut, maka Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 33 ayat (2) memiliki kewajiban untuk memutus sengketa tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu yang ada pada Pasal 33 ayat (1) terlampaui. Arbitrase dalam Layanan Penyelesaian Sengketa yang disediakan oleh LKPP ini bersifat terbuka dan dihadiri oleh para pihak yang telah bertandatangan dalam kontrak baik dengan didampingi maupun diwakili oleh kuasa hukumnya dengan syarat wajib menunjukkan surat kuasa khusus. Setelah 1313 serangkaian tahapan prosedut arbitrase seperti Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Pembuktian sudah terlaksana, maka masuklah arbitrase kepada tahapan Kesimpulan.

Dijelaskan pada Pasal 41 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 bahwa dalam tahapan kesimpulan Para pihak yang bersengketa memiliki hak yang diberikan oleh arbiter untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dimulai sejak Arbiter menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai. Setelah tahapan kesimpulan selesai, maka masuklah Arbitrase ketahapan yang paling ahir yaitu dimana arbiter melakukan

pengambilan Keputusan. Arbiter dalam Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan berpedoman pada pengaturan tentang Pengambilan Keputusan yang diatur pada Pasal 42 Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018. Setelah arbiter menetapkan putusan, maka paling lama 7 (tujuh) hari putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter tersebut harus dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa.

Pada ketentuan Pasal 42 ayat (13) dijelaskan bahwa apabila terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan secara sukarela, maka pihak lawannya dapat mengajukan gugatan baru ke ketua Pengadilan Negeri setempat atau dimungkinkan juga bagi para pihak untuk bersepakat agar menuangkan isi dari putusan tersebut ke dalam sebuah akta perdamaian dan terkait dengan pelaksanaan putusannya dapat dimintakan kepada Pengadilan agar putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada pada Pengadilan tersebut. Di dalam pengaturan pelaksanaan Arbitrase yang ada pada Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 terdapat beberapa penjelasan yang justru menimbulkan pertanyaan baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui forum ini. Di dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai apakah klausul penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase yang disediakan oleh LKPP ini harus dicantumkan di dalam kontrak agar forum ini dapat ditempuh. Selain itu pada Pasal 34 peraturan ini dijelaskan bahwa forum Arbitrase yang disediakan oleh LKPP ini bersifat terbuka, sedangkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

dijelaskan bahwa arbitrase bersifat tertutup. Kemudian penjelasan menyimpang yang terakhir adalah dalam Pasal 42 ayat (13) peraturan ini dijelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan gugatan baru. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjelaskan dengan tegas bahwa Arbitrase bersifat final dan mengikat.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para pihak yang ingin membuat sebuah kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menuangkan klausul pemilihan forum penyelesaian sengketa di dalam sebuah kontrak yang akan dibuat. Pemilihan forum penyelesaian sengketa bergantung pada kesepakatan diantara kedua pihak yang bersengketa karena para pihak memiliki kebebasan untuk memilih dan menyepakati forum penyelesaian sengketa tertentu yang akan digunakan.<sup>51</sup>

Kesepakatan tersebut dapat dituangkan pada saat perjanjian akan dibuat maupun pada saat sengketa telah timbul diantara kedua belah pihak. Untuk pemilihan sengketa yang dituangkan di dalam perjanjian, ketika timbul sengketa diantara kedua pihak tersebut maka penyelesaiannya dapat langsung melalui forum yang telah disetujui dan tertulis di dalam perjanjian tersebut. Ketika telah ditentukan salah satu forum penyelesaian sengketa tertentu, maka salah satu pihak tidak dapat membawa sengketa tersebut ke forum penyelesaian sengketa lain kecuali mendapatkan persetujuan dari pihak yang

---

<sup>51</sup> Purnamasari, Rahmanisa & Salim, Muhammad Agus, *Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, 7 RechtsVinding, 2018, hal. 102.

lain, karena kembali lagi mengingat bahwa hukum perdata tidak bersifat mengikat tetapi dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat. Dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa tidak dituangkan di dalam kontrak, maka secara otomatis penyelesaian sengketanya mengikuti apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang ada dalam perjanjian tersebut,

Dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jika tidak terdapat klausul perjanjian dalam kontrak maka penyelesaian sengketanya mengikuti apa yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan forum penyelesaian sengketa kontrak, tidak ada kewajiban yang mengikat para pihak yang ingin membuat kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menuangkan pemilihan forum ini sebagai forum penyelesaian sengketa kedalam perjanjian yang akan mereka buat. Kemudian terkait dengan kewajiban para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui forum ini tidak dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa dibentuknya forum penyelesaian sengketa kontrak ini hanyalah sebatas menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan forum yang wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kasus Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah pada putusan No.

403/PDT/2016/PT.BDG, Penggugat telah mendasarkan gugatan dan tuntutan nya berdasarkan kontrak Nomor 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengacu pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang ada di huruf R pada halaman 32 kontrak Nomor 79/91/BGE/P2K/SPK/SB.7/2013 tanggal 9 April 2013, telah secara tegas disebutkan bahwa semua Sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri;
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Selain itu dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 yang pada pokoknya menyatakan “Arbitrase merupakan *“Extra Yudicial”* yang lahir dari *“Clausula Arbitrase”*



atas suatu perjanjian yang mempunyai *legal effect* sehingga memberi kewenangan absolut kepada badan arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar atas asas hukum "*pacta sunt servanda*" dan karenanya hakim peradilan umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG. Oleh karena itu, menurut penulis sudah tepat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan memutuskan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 433/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut, yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini. Terkait dengan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa yaitu Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah pada putusan No. 403/PDT/2016/ PT.BDG adalah penggugat dianggap melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 80 ayat (2) dan (3). Akibat wanprestasi tersebut dikenakan sanksi berupa Pemutusan kontrak paket tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 187/91/BGE.P2K/2013 tanggal 27 November 2013, PT. Lewih Mentari menghentikan seluruh pekerjaan yang tidak selesai dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
2. Penyelesaian hukum sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian pada putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG, yaitu Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kontrak Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih melalui Pemboran Air Tanah didasarkan kontrak Nomor 79/91/BGE/P2K/SPK/ SB.7/2013 tanggal 9 April 2013, maka, mengacu pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang ada di huruf R tersebut, telah secara tegas disebutkan bahwa semua Sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menangani perkara yang merupakan akibat wanprestasi dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang dibuat dalam akte di bawah tangan) bila ditinjau dari hukum perdata, Hakim perlu melakukan analisa dan pengkajian hukum yang mendalam, dengan melakukan penelitian tentang sebab dari adanya sanksi penetapan Daftar Hitam. Apabila syarat penetapan Daftar Hitam telah terpenuhi, antara lain dengan adanya wanprestasi, hakim hendaknya memutus perkara bahwa penetapan sanksi Daftar Hitam yang dilakukan sudah tepat dikarenakan adanya wanprestasi, dimana bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka pihak lain dapat melakukan tindakan sebagai sanksi.
2. Penyedia jasa perlunya melakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan besarnya biaya, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Juga perlu adanya pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan serta mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2013.
- LKPP, *Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah” dalam Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah, 2010.
- LKPP, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Modul 1, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Purnamasari, Rahmanisa & Salim, Muhammad Agus, *Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yang Efektif Dalam*

- Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, 7 RechtsVinding, 2018.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim. H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Krafika, 2013.
- Saliman, Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Pradamedia Group, 2005.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta, 2008.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Simamora, Y. Sogar. *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2009.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2007.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudjatmoko, Emanuel, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal 19 Yuridika, 2004.
- Suherman, A.M., *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

**Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kongsruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Jurnal dan Website:**

Christopher & Schooner, *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market*, Journal of International Law, 2007.

<http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum>. diakses tanggal 10 Mei 2020.